



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II TERNATE

Alamat : Jl. Tugu Makugawene, Kel. Kalumata Puncak, Kec. Ternate Selatan
Laman : <http://bapasternate.kemenkumham.go.id/> Surel : bps.ternate@kemenkumham.go.id

Nomor : W29.PAS.PAS.8.PR.04.03-02 Ternate, 02 Januari 2024
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP)
Tahun 2023

KepadaYth:

Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Maluku Utara

Di -

Ternate,-

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara Nomor : W.29-PR.04-6834 tanggal, 07 Desember 2023 Perihal : Permintaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Tahun 2023, maka dengan hormat kami kirimkan (terlampir) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate.

Demikian kami sampaikan,dan diucapkan terima kasih.



K e p a l a



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Muhammad M. Marasabessy
NIP. 19781010 200312 1 003



KANWIL KEMENKUMHAM MALUKU UTARA BAPAS KELAS II TERNATE



LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate
Tahun 2023



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban akuntabilitas dalam pelaksanaan kinerja dan pengukuran kinerja dan rencana kinerja.

Laporan akuntabilitas kinerja pada Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate berisikan pelaksanaan tugas sesuai target kinerja dan perjanjian kinerja pada tahun 2023. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan gambaran dalam melakukan optimisasi peran Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate untuk peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pada tahun selanjutnya. Harapan kami dalam laporan ini juga akan menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dalam semangat reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Kantor Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate memiliki 5 wilayah kerja yaitu: Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kabupaten Pulau Taliabu. Wilayah kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate ini merupakan wilayah dengan kondisi geografis yang didominasi oleh kepulauan dan lautan. Tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate seperti pembuatan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), pendampingan untuk anak yang bermasalah dengan hukum, pembimbingan, dan pengawasan klien Pemasarakatan serta membangun kerjasama dan relasi kepada instansi lain harus tetap berjalan dan menjadi tantangan tersendiri bagi petugas kami dalam melaksanakan tugas. Hambatan dan halangan dalam bertugas juga kami sampaikan pada laporan ini guna nantinya digunakan sebagai bahan evaluasi.

Tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate dijabarkan pada target kinerja dan perjanjian kinerja Kantor Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate Tahun 2023, yang kemudian melahirkan laporan akuntabilitas kinerja sebagai bagian dari pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2023. Dengan harapan, dapat menyajikan hasil kinerja sasaran pada kegiatan duna mendukung pencapaian kinerja program dan kebijakan. Selain itu, sekaligus berfungsi sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Semoga laporan akuntabilitas kinerja ini dapat bermanfaat dalam memberikan informasi kepada seluruh pihak terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pemasarakatan pada Kantor Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate. Sekaligus sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan pimpinan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan bagi kita dalam menjalankan tugas dalam membangun Kementerian Hukum dan HAM RI dan Negara Indonesia.

Ternate, 2 Januari 2024

Kepala Bapas Kelas II Ternate



Muhammad M. Marasabessy, S.H., M.Si.
NIP. 19781010 200312 1 003

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA KANTOR	i
DAFTAR ISI	iii
IKTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
1. Urusan Tata Usaha	4
2. Subseksi Bimbingan Klien Anak.....	4
3. Subseksi Bimbingan Klien Dewasa.....	4
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Aspek Strategis	5
E. Isu Strategis.....	5
F. Sistematika Laporan.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
A. Rencana Strategis	7
B. Perjanjian Kinerja	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Capaian Kinerja	12
B. Realisasi Anggaran.....	34
C. Capaian Kinerja Anggaran.....	36
D. Capaian Kinerja Lainnya.....	37
BAB IV PENUTUP.....	42
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran.....	42
LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2023	44
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA 2023	48
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA 2022	52
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA 2024	56
LAMPIRAN SK TIM PENYUSUN LKjIP.....	60

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate sebagai salah satu satuan kerja yang menjalankan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, memiliki 2 Sasaran Kinerja dan 12 Indikator Kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis dari Program Utama yang diemban Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. Secara umum, pencapaian Sasaran Kinerja pada Bapas Kelas II Ternate pada tahun 2023 sudah cukup baik. Hal ini karena peran serta seluruh elemen organisasi Bapas Kelas II Ternate yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik.

Sementara itu pada tahun 2023 Bapas Kelas II Ternate mendapat dukungan manajemen dan teknis lainnya dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 3.439.044.000,00. Hasil capaian kinerja tersebut dijelaskan pada gambar tabel berikut:

No	Uraian Anggaran	Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	Rp. 2.529.882.000	Rp. 2.494.015.916	98.58 %
2	Belanja Barang	Rp. 909.162.000	Rp. 903.174.300	99.34 %
3	Belanja Modal	Rp. -	Rp. -	-
Total Anggaran		Rp. 3.439.044.000	Rp. 3.397.190.216	98.78 %

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi anggaran selama tahun 2023 mencapai 98.78% dengan total realisasi Rp. 3.397.190.216 dari total pagu Rp. 3.439.044.000,00.

Capaian Perjanjian Kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate dapat dilihat sesuai pada table dibawah ini:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak Pendidikan klien anak pada luar Lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga	60%	100%
		2. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%	33.33 %
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%	94.7%
2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan

2.	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan	1 Layanan	1 Layanan
3.	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Layanan	1 Layanan
4.	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan
5.	Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
6.	Jumlah kendaraan bermotor	6 Unit	6 Unit
7.	Jumlah perangkat pengolahan data dan komunikasi	10 unit	10 unit
8.	Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	16 Unit	16 Unit
9.	Jumlah gedung/bangunan	430 M ²	430 M ²

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintah harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate tahun 2023 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada serta ikut memenuhi tuntutan kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate.

Untuk mencapai akuntabilitas instansi Pemerintah yang baik, Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate.

Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan penelitian kemasarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate terletak di Jalan Tugu Makugawene, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.

Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate memiliki 5 wilayah kerja di Maluku Utara, yakni:

1. Kota Ternate,
2. Kabupaten Halmahera Barat,

3. Kabupaten Halmahera Selatan,
4. Kabupaten Kepulauan Sula,
5. Kabupaten Pulau Taliabu



Gambar 1. Wilayah Kerja Bapas Kelas II Ternate

Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate memiliki tugas dan fungsi seperti pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas), melakukan pendampingan kepada anak yang bermasalah dengan hukum, melakukan pembimbingan dan pengawasan kepada klien pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate tentunya harus menjalin kerja sama dan koodinasi dengan instansi terkait seperti Lembaga Pemasyarakata, Rumah Tahanan Negara, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Selain itu, Balai Pemasyarakatan juga menjalin kerja sama dengan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) guna membantu dalam melaksanakan program pembimbingan dan pengawasan kepada klien pemasyarakatan.

Sehubungan dengan tugas dan fungsi tersebut diatas banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate, untuk itu Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate diwajibkan untuk Menyusun Laporan Kinerja Tahunan Anggaran 2023 sebagai bahan pertanggungjawaban dan evaluasi selama periode tahun 2023.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sebagaimana diketahui sumber daya manusia yaitu Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang sangat penting dalam dinamika suatu organisasi mengingat tugas-tugas dalam system pemerintahan yang makin kompleks. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate,

berikut disampaikan struktur organisasi dan kondisi jumlah Aparatur Sipil Negara pada tahun 2023.



Gambar 2. Struktur Organisasi Bapas Kelas II Ternate

Jumlah pegawai pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate adalah 40 orang dengan rincian sebagai berikut:

Pejabat Struktural	:	4 Orang
JFT Pembimbingan Kemasyarakatan	:	14 Orang
JFT Asisten Pembimbing Kemasyarakatan	:	9 Orang
Staf / JFU	:	13 Orang

Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate secara teknis substantif berada di bawah dan tanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kepala Divisi Pemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas, Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pemasyarakatan;
2. Pelaksanaan tugas pemasyarakatan dalam bidang penelitian kemasyarakatan (Litmas);
3. Pelaksanaan tugas pemasyarakatan dalam bidang pendampingan anak yang bermasalah dengan hukum;
4. Pelaksanaan tugas pemasyarakatan dalam bidang pembimbingan klien pemasyarakatan;
5. Pelaksanaan tugas pemasyarakatan dalam bidang pengawasan klien pemasyarakatan;
6. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga;
7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas pemasyarakatan.

Kantor Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate terdiri atas beberapa seksi, yaitu:

1. Bagian Urusan Tata Usaha;
2. Sub Seksi Bimbingan Klien Anak;
3. Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa.

1. Bagian Urusan Tata Usaha

Bagian Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persurata, barang milik negara, dan rumah tangga.

2. Sub Seksi Bimbingan Klien Anak

Tugas dan Fungsi pada Sub Seksi Bimbingan Klien Anak meliputi menerima permintaan dan membuat penelitian kemasyarakatan bagi anak yang bermasalah dengan hukum dari pihak Kepolisian, Pengadilan, dan LPKA, serta instansi lain yang membutuhkan. Selain itu juga melaksanakan tugas pendampingan bagi anak yang bermasalah dengan hukum mulai dari tahap penyidikan di kepolisian hingga putusan pengadilan, melaksanakan bimbingan dan pengawasan terhadap anak yang telah selesai atau mendapatkan putusan atau penetapan hakim. Sub Seksi Bimbingan Klien Anak juga melaksanakan Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan baik di Bapas maupun di LPKA.

3. Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa

Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa memiliki tugas dalam menerima dan melakukan penelitian kemasyarakatan kepada warga binaan pemasarakatan sesuai permintaan dari Lapas dan Rutan, Kemudian Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa juga melaksanakan program bimbingan kepada klien pemasarakatan yang telah mendapatkan program integrasi serta melakukan pengawasan. Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa juga melaksanakan Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan yang di selenggarakan di Bapas ataupun di Lapas dan Rutan.

C. Maksud dan Tujuan

Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan sebagai bahan laporan setiap tahun atas kinerja yang telah di rencanakan dan laksanakan selama periode tahun 2023.

Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah:

1. Sebagai bahan evaluasi capaian kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate,

2. Sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate selama periode tahun 2023 secara akuntabel dan transparan.

D. Aspek Strategis

Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate merupakan unit pelaksana teknis dibawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang memiliki tugas dan fungsi yaitu melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan bagi Klien Pemasyarakatan. Tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate ini sangatlah penting karena sebagai pembimbing dan penawasan klien pemasyarakatan yang telah keluar dari Lapas agar dapat hidup berdampingan dengan masyarakat serta tidak lagi mengulangi tindak pidana. Selain itu, pembuatan penelitian kemasyarakatan sangatlah penting guna memberikan rekomendaasi pembinaan yang sesuai dengan latar belakang narapidana serta memberikan rekomendasi dapat atau tidaknya narapidana memperoleh program integrasi. Selain itu, tugas dan fungsi lain yaitu melakukan pendampingan terhadap anak dan klien dewasa dalam menjalani serangkaian proses pidana. Sehingga Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate memiliki 4 layanan pokok yaitu, Pendampingan, Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan, Pembimbingan, dan Pengawasan.

Tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate ini dipandang perlu dan sangat penting guna menciptakan keadaan masyarakat yang sadar dan tertib hukum serta dapat menciptakan insan masyarakat yang memiliki kepedulian dengan sesama.

E. Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate serta pencapaian kinerja tentunya memiliki hambatan tersendiri. Hambatan-hambatan dapat berupa:

1. Masih banyaknya putusan pidana penjara bagi pelaku anak,
2. Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate tidak menerima Salinan putusan pengadilan bagi pelaku anak,
3. Klien Pemasyarakatan yang telah menjalani integrasi tidak melaporkan diri secara tepat waktu,
4. Pada tahun 2023, Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate menjadi Pilot Project Pembentukan Griya Abhipraya.

Dari beberapa hambatan tersebut tentunya diperlukan perencanaan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi serta mengejar capaian kinerja. Oleh sebab itu, Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate sudah mencoba untuk selalu melakukan

koordinasi dengan instansi terkait, memberikan kebijakan-kebijakan baru, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang ada. Dengan demikian, tugas dan fungsi serta capaian kinerja tahun 2023 dapat terlaksana dan tercapai dengan baik.

F. Sistematika Laporan

Laporan kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate tahun 2023 ini menyajikan data capaian kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Target Kinerja, dan Rencana Kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate Tahun 2023. Selain itu, dalam laporan ini juga capaian kinerja lain serta perbandingan capaian kinerja dari tahun sebelumnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate ini dilakukan dengan mengumpulkan data, kajian, dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sasaran program yang ditetapkan. Adapun sistematika penyusunan laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

a. BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas profil Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate, Latar Belakang, Maksud dan Tujuan disusunnya laporan kinerja, serta menjelaskan pengertian dan rumusan pengukuran kinerja yang digunakan.

b. BAB II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2023 yang disusun mencakup seluruh kinerja subseksi termasuk pagu anggaran dan rencana realisasi anggarannya.

c. BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan tentang capaian kinerja dan realisasi anggaran atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023. Selanjutnya menjelaskan analisis capaian kinerja, termasuk faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian kinerja tersebut.

d. BAB IV Penutup

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja semester I tahun 2023 serta saran rekomendasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah: **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiapwarga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM, sebagai berikut : “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri,dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6, 7 dan 8 yang kemudian dijabarkan menjadi Misi Kementerian Hukum dan HAM RI, sebagai berikut: Misi :

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas;3
3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
4. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan;
6. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan
7. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan.

Dan sebagai salah satu Satuan Kerja dibawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang langsung bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara maka Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate melaksanakan Visi dan Misi tersebut diatas ditambah Visi & Misi dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate dengan misi “**Pelayanan Kemasyarakatan Berbasis Partisipasi dan Kemitraan**” dan Visi :

1. Meningkatkan bobot akurasi dan penajaman penelitian kemasyarakatan;
2. Pembimbing klien kemasyarakatan dengan keikutsertaan pengawas keluarga dan masyarakat;

3. Program kemitraan dengan Lembaga pelatihan dan produksi dalam pengembangan diri klien masyarakat.

B. Perjanjian Kinerja

Perencanaan kinerja disusun berdasarkan prioritas program masyarakat dari Direktorat Jenderal Masyarakat yang dijabarkan lebih lanjut dalam target kinerja, alokasi anggaran kegiatan masyarakat, serta perjanjian kinerja yang berisikan indikator kinerja yang harus dicapai.

Tabel 2.1. Target Kinerja Masyarakat Tahun 2023

Target Kinerja Masyarakat Tahun 2023
Percepatan pelaksanaan Back to Basic Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Pelayanan Tahanan
Percepatan pelaksanaan Back to Basic Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Pemenuhan Hak Tahanan di Lapas dan Rutan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan masyarakat di bidang pengelolaan basan baran
Penyelenggaraan layanan rehabilitasi masyarakat
Peningkatan kualitas layanan Kesehatan bagi tahanan dan WBP
Menurunnya persentase angka kesakitan Tahanan dan WBP di UPT Masyarakat
Penyusunan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Sistem Teknologi Informasi Masyarakat
Penguatan SDP Masyarakat dalam rangka transformasi melalui pertukaran data SPPT TI
Piloting Penerapan Keadilan Restoratif bagi pelaku dewasa pada 10 wilayah piloting
Pemberdayaan Pokmas bagi Klien Masyarakat
Peningkatan kualitas pelayanan pembinaan narapidana
Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban dengan peningkatan Kepatuhan Internal Petugas
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban dengan melakukan deteksi dini

Sesuai dengan tabel 1 diatas, menunjukkan terdapat target yang harus dipenuhi oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate, yakni Pemberdayaan Pokmas bagi Klien Pemasarakatan. Target kinerja tersebut memiliki kriteria keberhasilan, ukuran keberhasilan, target capaian serta data dukung yang harus dipenuhi Kantor Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate menerima alokasi anggaran sebesar Rp. 3.439.044.000,00 untuk tahun 2023. Anggaran tersebut kemudian di alokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel2.1. Alokasi Anggaran Tahun 2023

No	Uraian Anggaran	Belanja (Rp)	
1	Belanja Pegawai	Rp.	2.529.882.000
2	Belanja Barang	Rp.	909.162.000
3	Belanja Modal	Rp.	-
Total Anggaran		Rp.	3.439.044.000

Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate pda tahun 2023 memiliki Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Bapas dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Bapas Kelas II Ternate Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target
1.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemsarakatan dan pemenuhan hak Pendidikan klien anak pada luar Lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%
		2. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%
2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan

	2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	1 Layanan
	3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
	4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
	5. Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan
	6. Jumlah kendaraan bermotor	6 Unit
	7. Jumlah perangkat pengolahan data dan komunikasi	10 unit
	8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	16 Unit
	9. Jumlah gedung/bangunan	430 M ²

Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	Rp. 416.519.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakat	Rp. 3.022.525.000
Jumlah	Rp. 3.439.044.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah suatu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi instansi secara terukur sejalan dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Dalam mengukur keberhasilan/kegagalan atas pelaksanaan suatu program atau kegiatan/program perlu dilakukan pengukuran kinerja, sehingga dapat menunjukkan impact/outcome dari setiap indikator kinerja Bapas Ternate beserta analisisnya.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi pada Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate merupakan capaian dari pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang memuat beberapa indikator kinerja dan terjabarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Persentase capaian kinerja	Keterangan
1.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak Pendidikan klien anak pada luar Lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga	60%	100%	166,66%	Tercapai
		2. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%	33,33%	101,398%	Tercapai
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%	94,7%	270,6%	Tercapai
2.	Meningkatnya Dukungan Layanan	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT	1 Layanan	1 Layanan	100%	Tercapai

Manajemen Satker	Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu				
	2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%	Tercapai
	3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%	Tercapai
	4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%	Tercapai
	5. Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%	Tercapai
	6. Jumlah kendaraan bermotor	6 Unit	6 Unit	100%	Tercapai
	7. Jumlah perangkat pengolahan data dan komunikasi	10 unit	10 unit	100%	Tercapai
	8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	16 Unit	16 Unit	100%	Tercapai
	9. Jumlah gedung/bangunan	430 M ²	430 M ²	100%	Tercapai

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase Capaian
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 416.519.000	Rp. 411.382.000	98.77%
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 3.022.525.000	Rp. 2.985.808.745	98.79%

a. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga.

1) Perbandingan Target dan realisasi Kinerja Tahun 2023

Data klien pemsarakatan Bapas Kelas II Ternate pada tahun 2023 sebanyak 284 orang. Dari jumlah tersebut, diperoleh jumlah klien yang sudah bekerja sebanyak 284 orang, sehingga perhitungan realisasi adalah

$$\frac{284}{284} \times 100\% = 100\%$$

Kemudian perhitungan persentase capaian target klien usia produktif yang memperoleh atau memlanjtkan pekerjaan di luar Lembaga sebagai berikut:

$$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = \frac{100\%}{60\%} \times 100\% = 166,66\%$$

Dari hasil diatas, diperoleh Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga adalah 166,66%. Hal ini disebabkan karena Sebagian besar klien yang telah menjalani program integrasi memiliki usia produktif dan keinginan untuk kembali bekerja yang tinggi. Sehingga klien tersebut berusaha untuk mencari pekerjaan yang lebih baik guna menyambung hidup.

Tabel 3.2. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja SK1; IKK1 Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemsarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%	100%	166,66%

- 2) Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun sebelumnya

Tabel 3.3. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja SK1; IKK1 Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Tahun	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%	50%	100%	60%	100%	166.66%

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi “Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga” telah memenuhi target, pada tahun 2022 sebesar 100% meningkat pada tahun 2023 sebesar 166.66%.

- 3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target capaian di tahun 2021 dan di 2022 sudah terlampaui, sedangkan target capaian tahun 2023 telah tercapai lebih dari 100%. Secara umum, target kinerja untuk Indikator Sasaran Kegiatan “Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah” tahun 2021 adalah 95% telah terealisasi 97,04%, target di tahun 2022 adalah 96% telah terealisasi 98.64%, sementara target di tahun 2023 sebesar 97% telah terealisasi selama Tahun 2023 sebesar 98.77%.

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Realisasi			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	95%	96%	97%	98%	97.04%	98.64%	98.77%	0%

- 4) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran “Jumlah Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga” hanya dilakukan oleh Bapas Kelas II Ternate.
- 5) Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja
Indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini realisasinya telah melebihi target sehingga memperoleh capaian 166,66%. Hal ini dapat terjadi karena Bapas Kelas II Ternate senantiasa memberikan bimbingan

kemandirian dan keterampilan secara konsisten melalui kerjasama dengan Pokmas Lipas dan pihak-pihak lain, sehingga klien dalam masa pembimbingan telah dapat memperoleh pekerjaan dengan bekal keterampilan yang dimiliki.

b. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara.

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pendampingan Anak Bekonflik Hukum (ABH) dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak. Pendampingan dilakukan secara baik tanpa adanya intimidasi dan diskriminasi. Pendampingan ABH harus dilakukan secara profesional dan sesuai peraturan yang ada. Pendampingan dapat dilakukan melalui rehabilitasi sosial. Hal ini agar anak nantinya mampu berinteraksi kembali dalam kehidupan masyarakat setelah mengalami suatu masalah. Berkaitan dengan hal tersebut maka di Indonesia diperlukan perlindungan, pengawasan, dan pendampingan anak baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Adapun data Pendampingan ABH selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5. Hasil Pendampingan ABH Tahun 2023

Jenis Putusan	Jumlah Putusan
Anak dikembalikan ke orang tua	16
Pidana Bersyarat	0
Pidana Penjara	8
Total	24

Dari data diatas, dapat dihitung jumlah anak yang mendapatkan pidana penjara sebagai berikut:

$$\frac{\text{Putusan Pidana Penjara}}{\text{Putusan Pengadilan}} \times 100\% = \frac{8}{24} \times 100\% = 33,33\%$$

Hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa putusan pidana penjara kepada anak sebanyak 30% dari jumlah keseluruhan putusan pengadilan. Setelah didapat hasil diatas, kemudian dihitung capaian target seperti pada perhitungan dibawah ini:

$$\frac{\text{Target Capaian} - (\text{Realisasi} - \text{Terget Capaian})}{\text{Target Capaian}} \times 100\%$$

$$\frac{55 - (33,33 - 55)}{55} \times 100\% = \frac{55 - (-21,67)}{55} \times 100\%$$

$$\frac{76,67}{55} \times 100\% = 101,394 \%$$

Dari hasil tersebut didapatkan hasil persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara adalah 101,394%. Apabila dibandingkan dengan target capaian, hasil diatas tercapai karena capaian realisasi lebih besar dari target capaian yang mana seharusnya capaian realisasi harus lebih kecil dari target capaian.

Tabel 3.6. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian SK1; IKK2 Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	2. Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%	33,33%	101,394%

- 2) Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Tabel 3.7. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja SK1; IKK2 Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Tahun	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%	0%	0%	55%	33,33%	101,394%

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi “Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara” memenuhi target, pada tahun 2022 sebesar 0% dan tahun 2023 sebesar 101,394%. Hasil tersebut masih lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu tahun 2022 sebesar 60% dan tahun 2023 sebesar 55%.

- 3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target capaian di tahun 2021 dan di 2022 sudah terlampaui, sedangkan target capaian tahun 2023 telah tercapai lebih dari 100%. Secara umum, target kinerja untuk Indikator Sasaran Kegiatan “Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah” tahun 2021 adalah 95% telah terealisasi 97,04%, target di tahun 2022 adalah 96% telah terealisasi 98.64%, sementara target di tahun 2023 sebesar 97% telah terealisasi selama Tahun 2023 sebesar 98.77%.

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Realisasi			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	95%	96%	97%	98%	97.04%	98.64%	98.77%	0%

- 4) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran “Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara” hanya dilakukan oleh Bapas Kelas II Ternate.
- 5) Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja
Keberhasilan dalam capaian kinerja ini, dikarenakan pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu Pembimbing Kemasyarakatan telah berupa untuk memberikan rekomendasi putusan pidana diluar pidana penjara kepada majelis hakim anak melalui hasil penelitian kemasyarakatan. Selain itu, Bapas Kelas II Ternate juga berupa untuk membangun komunikasi dan jaringan kepada pemerintas, lembaga, organisasi, dan kelompok aasyarakat untuk melaksanakan alternatif pidana penjara bagi anak.

c. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya.

- 1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Jumlah klien anak yang telah memperoleh program integrasi baik cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, dan bimbingan hasil diversifikasi sebanyak 19 anak. Data klien anak yang melanjutkan Pendidikan sebanyak 18 anak sehingga diperoleh persentase sebesar:

$$\frac{18}{19} \times 100\% = 94,7\%$$

Dari hasil diatas, kemudian dihitung persentase capaian target sebagai berikut:

$$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = \frac{94,7\%}{35\%} \times 100\% = 270,67\%$$

Dari hasil perhitungan persentase capaian target diatas didapatkan hasil sebanyak 270,67%.

Tabel 3.9. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian SK1; IKK3 Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pelayanan bimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	3. Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%	94,7%	270,67%

- 2) Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Tabel 3.10. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja SK1; IKK3 Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Tahun	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%	87,50%	291,66%	35%	94,7%	270,67%

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi “Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya” telah memenuhi target, pada tahun 2022 sebesar 291,66% dan pada tahun 2023 sebesar 270,67%.

- 3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target capaian di tahun 2021 dan di 2022 sudah terlampaui, sedangkan target capaian tahun 2023 telah tercapai lebih dari 100%. Secara umum, target kinerja untuk Indikator Sasaran Kegiatan “Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah” tahun 2021 adalah 95% telah terealisasi 97,04%, target di tahun 2022 adalah 96% telah terealisasi 98.64%, sementara target di tahun 2023 sebesar 97% telah terealisasi selama Tahun 2023 sebesar 98.77%.

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Realisasi			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	95%	96%	97%	98%	97.04%	98.64%	98.77%	0%

- 4) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran “Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya” hanya dilakukan oleh Bapas Kelas II Ternate.

5) Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan

Indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini realisasinya telah melebihi target sehingga memperoleh capaian 270,67. Hal ini dapat terjadi karena setiap anak yang didampingi petugas Bapas Kelas II Ternate senantiasa diberikan pemahaman tentang pentingnya menjalani pendidikan. Serta hasil dari menurunnya putusan penjara terhadap klien Anak, juga dapat memberikan kesempatan kepada klien Anak untuk dapat memperoleh pendidikan di luar lembaga.

d. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu.

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Kegiatan ini meliputi kegiatan perencanaan & penganggaran, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban laporan keuangan. Selama tahun 2023, kegiatan dilaksanakan dengan baik dan sesuai target yang ditetapkan. Kegiatan penyusunan dokumen rencana kerja telah disusun pada awal tahun dan dilaksanakan dengan baik, anggaran UPT telah dilakukan penyerapan dan terlaksana sesuai DIPA, dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu telah dapat dilaksanakan dengan baik berdasarkan hasil laporan LKJIP. Sehingga layanan dukungan manajemen satker pada indikator kinerja ini telah terealisasi sesuai target yaitu 1 layanan.

Perhitungan Capaian Kinerja

$$\% = \frac{\text{Realisasi Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu}}{\text{Target Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{1 \text{ layanan}}{1 \text{ layanan}} \times 100\% \Rightarrow 100\%$$

Berdasarkan data tersebut pada Indikator Kinerja Kegiatan “Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu” telah tercapai 100%.

Tabel 3.11. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian SK2; IKK1 Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 layanan	1 layanan	100%

2) Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi “Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu” memenuhi target tahun 2022 sebesar 1 layanan dan memenuhi target pada tahun 2023 sebesar 1 layanan, terjadi kestabilan.

Tabel 3.12. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian SK2; IKK1 Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Tahun	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indikator Kinerja Kegiatan						
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 layanan	1 layanan	100%	1 layanan	1 layanan	100%

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target capaian di tahun 2021 dan di 2022 sudah terlampaui, sedangkan target capaian tahun 2023 telah tercapai lebih dari 100%. Secara umum, target kinerja untuk Indikator Sasaran Kegiatan “Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah” tahun 2021 adalah 95% telah terealisasi 97,04%, target di tahun 2022 adalah 96% telah terealisasi 98.64%, sementara target di tahun 2023 sebesar 97% telah terealisasi selama Tahun 2023 sebesar 98.77%.

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Realisasi			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	95%	96%	97%	98%	97.04%	98.64%	98.77%	0%

4) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran “Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu” hanya dilakukan oleh Bapas Kelas II Ternate.

5) Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan

Kegiatan ini meliputi kegiatan perencanaan & penganggaran, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban laporan keuangan.

Selama tahun 2023, kegiatan dilaksanakan dengan baik dan sesuai target yang ditetapkan, mencapai 100%. Hal ini dapat terjadi keberhasilannya karena komitmen Bapas Kelas II Ternate dalam melaksanakan dan menyelesaikan seluruh rencana-rencana kerja yang telah ditetapkan secara tertib.

e. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan.

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Kegiatan telah dilaksanakan oleh Urusan Umum dalam pengelolaan urusan perlengkapan dan barang milik negara serta pelaksanaan urusan umum di lingkungan Bapas Ternate. Kegiatan tersebut meliputi rangkaian kegiatan antara lain pengelolaan urusan perencanaan, pengadaan dan analisis kebutuhan barang milik negara, pengelolaan urusan penatausahaan dan penghapusan barang milik negara, pengelolaan urusan perawatan barang milik negara dan rumah tangga. Sehingga layanan dukungan manajemen satker pada indikator kinerja ini telah terealisasi sesuai target yaitu 1 layanan.

Tabel 3.13. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian SK2; IKK2 Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
2.	Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker	2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah-tangga	1 layanan	1 layanan	100%

Perhitungan Capaian Kinerja

$$\% = \frac{\text{Realisasi Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah-tangga}}{\text{Target Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah-tangga}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{1 \text{ layanan}}{1 \text{ layanan}} \times 100\% \Rightarrow \mathbf{100\%}$$

Berdasarkan data tersebut pada Indikator Kinerja Kegiatan “Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah-tangga” telah tercapai 100%.

2) Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi “Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah-tangga” memenuhi target tahun 2022 sebesar 1 layanan dan memenuhi target pada tahun 2023 sebesar 1 layanan, terjadi kestabilan.

Tabel 3.14. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian SK2; IKK2 Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Tahun	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah-tangga"	1 layanan	1 layanan	100%	1 layanan	1 layanan	100%

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target capaian di tahun 2021 dan di 2022 sudah terlampaui, sedangkan target capaian tahun 2023 telah tercapai lebih dari 100%. Secara umum, target kinerja untuk Indikator Sasaran Kegiatan "Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah" tahun 2021 adalah 95% telah terealisasi 97,04%, target di tahun 2022 adalah 96% telah terealisasi 98.64%, sementara target di tahun 2023 sebesar 97% telah terealisasi selama Tahun 2023 sebesar 98.77%.

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Realisasi			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	95%	96%	97%	98%	97.04%	98.64%	98.77%	0%

4) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah- tangga hanya dilakukan oleh Bapas Kelas II Ternate.

5) Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan

Kegiatan telah dilaksanakan oleh Urusan Umum dalam pengelolaan urusan perlengkapan dan barang milik negara serta pelaksanaan urusan umum di lingkungan Bapas Ternate. Kegiatan tersebut meliputi rangkaian kegiatan antara lain pengelolaan urusan perencanaan, pengadaan dan analisis kebutuhan barang milik negara, pengelolaan urusan penatausahaan dan penghapusan barang milik negara, pengelolaan urusan perawatan barang milik negara dan rumah tangga. Sehingga seluruh kegiatan dapat tercapai sesuai target.

f. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan.

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Kegiatan telah dilaksanakan oleh Urusan Kepegawaian dalam Pembinaan Fisik Mental dan Disiplin (FMD) Peningkatan kapasitas petugas PAS dengan kegiatan untuk menunjang Tugas dan Fungsi (TUSI) secara langsung telah dilaksanakan dengan baik. Sehingga layanan dukungan manajemen satker pada indikator kinerja ini telah terealisasi sesuai target yaitu 1 layanan.

Tabel 3.15. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian SK2; IKK3 Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
2.	Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker	3. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah-tangga	1 layanan	1 layanan	100%

Perhitungan Capaian Kinerja

$$\% = \frac{\text{Realisasi Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan}}{\text{Target Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{1 \text{ layanan}}{1 \text{ layanan}} \times 100\% \Rightarrow \mathbf{100\%}$$

Berdasarkan data tersebut pada Indikator Kinerja Kegiatan “Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan” telah tercapai 100%.

- 2) Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi “Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan” memenuhi target tahun 2022 sebesar 1 layanan dan memenuhi target pada tahun 2023 sebesar 1 layanan, terjadi kestabilan.

Tabel 3.14. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian SK2; IKK3 Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Tahun	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 layanan	1 layanan	100%	1 layanan	1 layanan	100%

- 3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target capaian di tahun 2021 dan di 2022 sudah terlampaui, sedangkan target capaian tahun 2023 telah tercapai lebih dari 100%. Secara umum, target

kinerja untuk Indikator Sasaran Kegiatan “Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah” tahun 2021 adalah 95% telah terealisasi 97,04%, target di tahun 2022 adalah 96% telah terealisasi 98.64%, sementara target di tahun 2023 sebesar 97% telah terealisasi selama Tahun 2023 sebesar 98.77%.

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Realisasi			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	95%	96%	97%	98%	97.04%	98.64%	98.77%	0%

4) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan hanya dilakukan oleh Bapas Kelas II Ternate.

5) Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kegiatan telah dilaksanakan oleh Urusan Kepegawaian dalam Pembinaan Fisik Mental dan Disiplin (FMD) guna Peningkatan kapasitas petugas PAS dengan kegiatan untuk menunjang Tugas dan Fungsi (TUSI) secara langsung telah dilaksanakan dengan baik. Kegiatan dilaksanakan dengan baik mencapai 100%.

g. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel tepat waktu.

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Kegiatan Pelaksanakan Pengelolaan Keuangan telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku dalam hal pelaporan dan pembukuan oleh bendahara. Selain itu juga melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait Seperti KPPN dan Ditjen Perbendaharaan. Selama tahun 2023, kegiatan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai target yang ditetapkan. Sehingga layanan dukungan manajemen satker pada indikator kinerja ini telah terealisasi sesuai target yaitu 1 layanan.

Tabel 3.15. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian SK2; IKK4 Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
2.	Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker	4. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 layanan	1 layanan	100%

Perhitungan Capaian Kinerja

$$\% = \frac{\text{Realisasi Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu}}{\text{Target Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{1 \text{ layanan}}{1 \text{ layanan}} \times 100\% \Rightarrow 100\%$$

Berdasarkan data tersebut pada Indikator Kinerja Kegiatan “Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu” telah tercapai 100%.

- 2) Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi “Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu” memenuhi target tahun 2022 sebesar 1 layanan dan memenuhi target pada tahun 2023 sebesar 1 layanan, terjadi kestabilan.

Tabel 3.16. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian SK2; IKK4 Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Tahun	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 layanan	1 layanan	100%	1 layanan	1 layanan	100%

- 3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target capaian di tahun 2021 dan di 2022 sudah terlampaui, sedangkan target capaian tahun 2023 telah tercapai lebih dari 100%. Secara umum, target kinerja untuk Indikator Sasaran Kegiatan “Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah” tahun 2021 adalah 95% telah terealisasi 97,04%, target di tahun 2022 adalah 96% telah terealisasi 98.64%, sementara target di tahun 2023 sebesar 97% telah terealisasi selama Tahun 2023 sebesar 98.77%.

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Realisasi			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	95%	96%	97%	98%	97.04%	98.64%	98.77%	0%

4) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu hanya dilakukan oleh Bapas Kelas II Ternate.

5) Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan

Selama tahun 2023, kegiatan dilaksanakan dengan baik dan sesuai target yang ditetapkan, sehingga tercapai 100%. Hal ini dapat terjadi karena tim pengelola keuangan senantiasa secara konsisten melakukan pelaksanaan dan pelaporan keuangan sesuai target waktu yang telah ditetapkan sehingga minim terjadi keterlambatan.

h. Jumlah Layanan Perkantoran.

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Guna menunjang tugas pokok dan fungsi Pemasarakatan dibutuhkan *output* dalam rangka pelaksanaan operasional perkantoran untuk mendukung pencapaian kinerja, kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik selama tahun anggaran 2023. Sehingga layanan dukungan manajemen satker pada indikator kinerja ini telah terealisasi sesuai target yaitu 1 layanan.

Tabel 3.17. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian SK2; IKK5 Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
2.	Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker	5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 layanan	1 layanan	100%

Perhitungan Capaian Kinerja

$$\% = \frac{\text{Realisasi Jumlah layanan perkantoran}}{\text{Target Jumlah layanan perkantoran}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{1 \text{ layanan}}{1 \text{ layanan}} \times 100\% \Rightarrow 100\%$$

Berdasarkan data tersebut pada Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah layanan perkantoran” telah tercapai 100%.

2) Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi “Jumlah layanan perkantoran” memenuhi target tahun 2022 sebesar 1 layanan dan memenuhi target pada tahun 2023 sebesar 1 layanan, terjadi kestabilan.

Tabel 3.18. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian SK2; IKK5 Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Tahun	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Layanan Perkantoran	1 layanan	1 layanan	100%	1 layanan	1 layanan	100%

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target capaian di tahun 2021 dan di 2022 sudah terlampaui, sedangkan target capaian tahun 2023 telah tercapai lebih dari 100%. Secara umum, target kinerja untuk Indikator Sasaran Kegiatan “Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah” tahun 2021 adalah 95% telah terealisasi 97,04%, target di tahun 2022 adalah 96% telah terealisasi 98.64%, sementara target di tahun 2023 sebesar 97% telah terealisasi selama Tahun 2023 sebesar 98.77%.

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Realisasi			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	95%	96%	97%	98%	97.04%	98.64%	98.77%	0%

4) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Jumlah layanan perkantoran hanya dilakukan oleh Bapas Kelas II Ternate.

5) Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan

Kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik selama tahun anggaran 2023 sehingga tercapai 100%. Kegiatan ini dapat berhasil karena adanya dukungan dari tim pengelola keuangan untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan atas kebutuhan sarana dan prasarana terkait pelayanan perkantoran.

i. Jumlah Kendaraan Bermotor

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Guna menunjang tugas pokok dan fungsi Pemasyarakatan serta peningkatan pelayanan public, dibutuhkan sarana dalam rangka pelaksanaan operasional perkantoran untuk mendukung pencapaian kinerja. Pada tahun 2023 ini terdapat target perawatan kendaraan bermotor dengan realisasi pada tahun 2023 telah tercapai 100%.

Tabel 3.19. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian SK2; IKK6 Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
2.	Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker	6. Jumlah Kendaraan Bermotor	6 unit	6 unit	100%

Perhitungan Capaian Kinerja

$$\% = \frac{\text{Realisasi Jumlah Kendaraan Bermotor}}{\text{Target Jumlah Jumlah Kendaraan Bermotor}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{6 \text{ unit}}{6 \text{ unit}} \times 100\% \Rightarrow \mathbf{100\%}$$

Berdasarkan data tersebut pada Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Kendaraan Bermotor” telah tercapai 100%.

2) Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi “Jumlah kendaraan bermotor” memenuhi target tahun 2022 sebesar 1 layanan dan memenuhi target pada tahun 2023 sebesar 1 layanan, terjadi kestabilan.

Tabel 3.20. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian SK2; IKK6 Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Tahun	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Kendaraan Bermotor	6 unit	6 unit	100%	6 unit	6 unit	100%

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target capaian di tahun 2021 dan di 2022 sudah terlampaui, sedangkan target capaian tahun 2023 telah tercapai lebih dari 100%. Secara umum, target kinerja

untuk Indikator Sasaran Kegiatan “Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah” tahun 2021 adalah 95% telah terealisasi 97,04%, target di tahun 2022 adalah 96% telah terealisasi 98.64%, sementara target di tahun 2023 sebesar 97% telah terealisasi selama Tahun 2023 sebesar 98.77%.

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Realisasi			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	95%	96%	97%	98%	97.04%	98.64%	98.77%	0%

4) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Jumlah kendaraan bermotor hanya dilakukan oleh Bapas Kelas II Ternate.

5) Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan
Kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik selama tahun anggaran 2023 sehingga tercapai 100%. Kegiatan ini dapat berhasil karena adanya dukungan dari tim pengelola keuangan untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan atas kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelayanan publik Bapas Kelas II Ternate sehingga pemeliharaan kendaraan operasional kantor berupa 6 unit kendaraan bermotor dapat terlaksana.

j. Jumlah perangkat pengolahan data dan komunikasi

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas Kelas II Ternate, diperlukan sarana dan prasarana guna menunjang tugas dan fungsi tersebut. Pada tahun 2023 ini terdapat target jumlah perangkat pengolahan data dan komunikasi dengan realisasi pada tahun 2023 telah tercapai 100%.

Tabel 3.21. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian SK2; IKK7 Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
2.	Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker	7. Jumlah Perangkat Pengelolah Data dan Komunikasi	10 unit	10 unit	100%

Perhitungan Capaian Kinerja

$$\% = \frac{\text{Realisasi Jumlah Perangkat Pengeloh Data dan Komunikasi}}{\text{Target Jumlah Jumlah Perangkat Pengeloh Data dan Komunikasi}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{10 \text{ unit}}{10 \text{ unit}} \times 100\% \Rightarrow 100\%$$

Berdasarkan data tersebut pada Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Perangkat Pengelolah Data dan Komunikasi” telah tercapai 100%.

- 2) Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Pada indikator kinerja kegiatan ini, terdapat konsistensi dalam capaian kinerja tahun 2023 dan tahun 2022 dimana capaian kinerja “Jumlah perangkat pengelolah data dan komunikasi” yaitu 100%.

Tabel 3.22. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian SK2; IKK7 Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Tahun	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Perangkat Pengelolah Data dan Komunikasi	10 unit	10 unit	100%	10 unit	10 unit	100%

- 3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target capaian di tahun 2021 dan di 2022 sudah terlampaui, sedangkan target capaian tahun 2023 telah tercapai lebih dari 100%. Secara umum, target kinerja untuk Indikator Sasaran Kegiatan “Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah” tahun 2021 adalah 95% telah terealisasi 97,04%, target di tahun 2022 adalah 96% telah terealisasi 98.64%, sementara target di tahun 2023 sebesar 97% telah terealisasi selama Tahun 2023 sebesar 98.77%.

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Realisasi			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	95%	96%	97%	98%	97.04%	98.64%	98.77%	0%

- 4) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Jumlah perangkat pengelolah data dan komunikasi hanya dilakukan oleh Bapas Kelas II Ternate.
- 5) Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan
Kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik selama tahun anggaran 2023 sehingga tercapai 100%. Kegiatan ini dapat berhasil karena adanya dukungan dari tim pengelola keuangan untuk terus melakukan evaluasi

dan perbaikan atas kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelayanan publik Bapas Kelas II Ternate sehingga pemeliharaan perangkat pengelolah data dan komunikasi sebanyak 10 unit dapat terlaksana.

k. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas Kelas II Ternate, diperlukan sarana dan prasarana guna menunjang tugas dan fungsi tersebut. Pada tahun 2023 ini terdapat target jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran dengan realisasi pada tahun 2023 telah tercapai 100%.

Tabel 3.23. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian SK2; IKK8 Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
2.	Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker	8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	16 unit	16 unit	100%

Perhitungan Capaian Kinerja

$$\% = \frac{\text{Realisasi Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran}}{\text{Target Jumlah Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{10 \text{ unit}}{10 \text{ unit}} \times 100\% \Rightarrow 100\%$$

Berdasarkan data tersebut pada Indikator Kinerja Kegiatan “Peralatan dan Fasilitas Perkantoran” telah tercapai 100%.

2) Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Pada indikator kinerja kegiatan ini, terdapat konsistensi dalam capaian kinerja tahun 2023 dan tahun 2022 dimana capaian kinerja “Jumlah Peralatan Fasilitas Perkantoran” yaitu 100%.

Tabel 3.24. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian SK2; IKK8 Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Tahun	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	16 unit	16 unit	100%	16 unit	16 unit	100%

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target capaian di tahun 2021 dan di 2022 sudah terlampaui, sedangkan target capaian tahun 2023 telah tercapai lebih dari 100%. Secara umum, target kinerja untuk Indikator Sasaran Kegiatan “Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah” tahun 2021 adalah 95% telah terealisasi 97,04%, target di tahun 2022 adalah 96% telah terealisasi 98.64%, sementara target di tahun 2023 sebesar 97% telah terealisasi selama Tahun 2023 sebesar 98.77%.

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Realisasi			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	95%	96%	97%	98%	97.04%	98.64%	98.77%	0%

- 4) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran hanya dilakukan oleh Bapas Kelas II Ternate.
- 5) Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Peralatan dan fasilitas perkantoran di Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate dalam rangka mendukung pelaksanaan tusi berupa 16 unit penunjang telah terlaksana dengan baik. Dengan demikian, target 16 unit di perjanjian kinerja telah terlaksana.

I. Jumlah Gedung/Bangunan

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Target kinerja pada indicator Jumlah Gedung/ Bangunan adalah 430 meter persegi dan realisasi pada tahun ini adalah 430 meter persegi. Sehingga target kinerja tercapai 100%.

Tabel 3.25. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian SK2; IKK9 Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
2.	Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker	9. Jumlah Gedung/ Bangunan	430 M ²	430 M ²	100%

Perhitungan Capaian Kinerja

$$\% = \frac{\text{Realisasi Jumlah Gedung/ Bangunan}}{\text{Target Jumlah Jumlah Gedung/ Bangunan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{430 \text{ M}^2}{430 \text{ M}^2} \times 100\% \Rightarrow \mathbf{100\%}$$

Berdasarkan data tersebut pada Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Gedung / Perkantoran” telah tercapai 100%.

- 2) Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.26. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian SK2; IKK9 Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Tahun	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Gedung/ Perkantoran	260 M ²	260 M ²	100%	430 M ²	430 M ²	100%

- 3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target capaian di tahun 2021 dan di 2022 sudah terlampaui, sedangkan target capaian tahun 2023 telah tercapai lebih dari 100%. Secara umum, target kinerja untuk Indikator Sasaran Kegiatan “Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah” tahun 2021 adalah 95% telah terealisasi 97,04%, target di tahun 2022 adalah 96% telah terealisasi 98.64%, sementara target di tahun 2023 sebesar 97% telah terealisasi selama Tahun 2023 sebesar 98.77%.

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Realisasi			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	95%	96%	97%	98%	97.04%	98.64%	98.77%	0%

- 4) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Jumlah Gedung/ Perkantoran hanya dilakukan oleh Bapas Kelas II Ternate.
- 5) Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan
Pemeliharaan Gedung/Bangunan di Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate dengan luas 430 M² telah terlaksana dengan baik. Dengan demikian, target di perjanjian kinerja telah terlaksana.

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023, Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate mendapatkan dukungan anggaran sejumlah Rp. 3.439.044.000,00. Pada tahun 2023 ini, Bapas

Kelas II Ternate telah berhasil merealisasikan anggaran sejumlah Rp. 3.397.190.216,00 atau sebesar 98.78 %. Adapun perbandingan realisasi anggaran Bapas Kelas II Ternate Tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.27. Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2022 dan 2023

No	Uraian Anggaran	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Tahun 2022				
1	Belanja Pegawai	Rp. 2.468.902.000	Rp. 2.352.516.888	95.29 %
2	Belanja Barang	Rp. 1.352.987.000	Rp. 1.303.520.600	96.34 %
3	Belanja Modal	Rp. 150.000.000	Rp. 147.720.480	98.48 %
Total Anggaran		Rp. 3.971.889.000	Rp. 3.803.757.968	95.77 %
Tahun 2023				
1	Belanja Pegawai	Rp. 2.529.882.000	Rp. 2.494.015.916	98.58 %
2	Belanja Barang	Rp. 909.162.000	Rp. 903.174.300	99.34 %
3	Belanja Modal	Rp. -	Rp. -	- %
Total Anggaran		Rp. 3.439.044.000	Rp. 3.397.190.216	98.78 %

Berikut data penyerapan Bapas Kelas II Ternate per sasaran kegiatan sehingga terlihat penggunaan anggaran dalam setiap pencapaian sasaran kegiatan bapas Kelas II Ternate.

Tabel Penyerapan Anggaran per Sasaran Kegiatan Tahun 2023

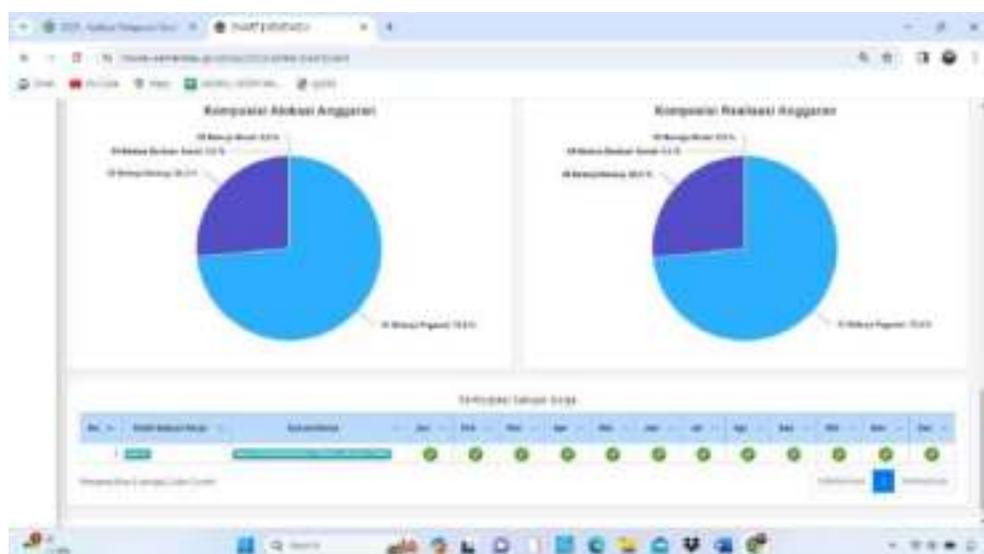
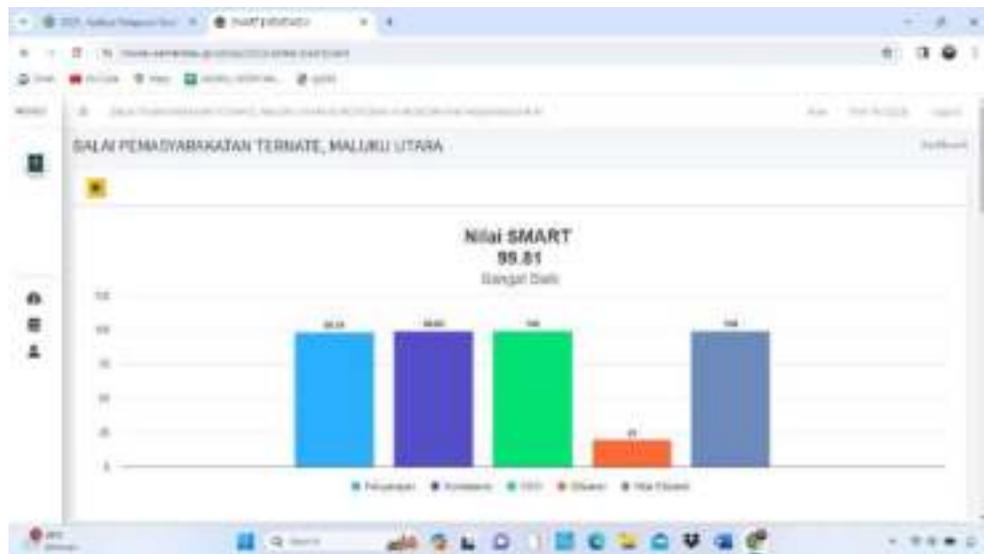
NO	SASARAN KEGIATAN	TOTAL		PERSENTASE
		PAGU	REALISASI	
1.	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	416.519.000	411.382.000	98.77%
2.	Program Layanan Dukungan Manajemen	3.022.525.000	2.985.808.745	98.79%
Total		3.439.044.000	3.397.190.745	98.78%

C. Capaian Kinerja Anggaran

1) Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA

Dalam rangka penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Kementerian/Lembaga menginput Capaian Kinerja pada aplikasi berbasis website Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi SMART DJA. Aplikasi SMART DJA dapat diakses melalui laman <https://smart.kemenkeu.go.id>. Sub Komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 Variabel yaitu:

- Capaian Keluaran, bobot 43,5%
- Penyerapan Anggaran, bobot 28,6%
- Efisiensi, bobot 18,2%
- Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan (Deviasi RPD awal dan akhir), bobot 9,7%



Berdasarkan diatas dapat disimpulkan bahwa Nilai Pencapaian Kinerja Anggaran Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate Tahun 2023 pada aplikasi

SMART DJA adalah **99.81** dengan rincian sebagai berikut:

2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA)

IKPA adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap Perencanaan, Efektivitas Pelaksanaan Anggaran, Efisiensi Pelaksanaan Anggaran, dan Kepatuhan terhadap Regulasi. Tujuan Pengukuran Kinerja dengan IKPA yaitu untuk Kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung Manajemen Kas dan Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN TERNATE, MALUKU UTARA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Survei Trips: 2023/2023

No	Kode RPPN	Kode ES	Kode Subes	Uraian Subes	Alokasi	Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Nilai Total	Rasio Realisasi	Nilai Akhir (Nilai Total/Realisasi/Revisi)	
						Revisi RPPN	Deviasi Halus (0,00%)	Penyempitan Anggaran	Biaya Kontribusi	Penghematan Tagihan	Penghematan LPF dan TSP	Penghematan SPN				Capaian Output
1	002	013	K0101	BALAI PEMASYARAKATAN TERNATE, MALUKU UTARA	Uraian	100,00	88,80	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	18,80	60%	98,33
					Revisi	10	10	00	0	0	10	0	00			
					Nilai Akhir	11,00	8,88	20,00	0,00	0,00	10,00	0,00	20,00			
					Total Ases	61,30			100,00			100,00				

Berdasarkan data di atas, nilai IKPA pada Bapas Kelas II Ternate tahun 2023 adalah 98,33.

Adapun pengukuran realisasi kinerja anggaran didasarkan pada 60% nilai SMART dan 40% nilai IKPA, sehingga nilainya adalah sebagai berikut;

$$(60\% \times 99,81 = 59,886) + (40\% \times 98,33 = 39,332) = 99,218$$

Dapat disimpulkan, hasil akhir dari capaian kinerja anggaran pada Bapas Ternate adalah **99,218**

D. Capaian Kinerja Lainnya

Capaian kinerja lainnya berisikan capaian pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate pada bidang teknis serta capaian pada aplikasi E-Performance dan E-Monev BAPPENAS, diantaranya sebagai berikut:

1. Aplikasi E-Performance

Aplikasi E-Performance Kementerian Hukum dan Ham adalah aplikasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Selama tahun 2023, capaian kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate pada aplikasi E-Performance dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

2. Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM

Pada Target Kinerja Tahun 2023, Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate telah memenuhi capaian yang ditentukan yaitu terealisasinya kegiatan Pascarehabilitasi Klien Narkotika. Capaian tersebut tergambar sesuai tabel berikut:

Tabel 10. Capaian Target Kinerja Tahun 2023

Target Kinerja Tahun 2023				Realisasi Capaian
Pemberdayaan	Pokmas	bagi	Klien	1. Telah melakukan koordinasi kepada instansi pemerintah,
Pemasarakatan				

4. Kegiatan Prioritas Nasional

Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate telah menjadi salah satu *piloting project* dalam pelaksanaan pembentukan Griya Abhipraya oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Dalam hal ini, Bapas Ternate telah berupaya untuk memenuhi program *piloting project* tersebut dengan membentuk Griya Abhipraya “Tike Malaha”. Griya Abhipraya yang dibentuk oleh Bapas Ternate ini merupakan Griya Abhipraya dengan madel mandiri atau swasembada dari Bapas Ternate. Griya Abhipraya “Tike Malaha” ini akan digunakan sebagai sarana dalam membantu Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan guna membina, membimbing, dan memberikan pengawasan kepada klien dari Bapas Ternate.

Adapun Griya Abhipraya “Tike Malaha” terletak di Perumahan Kemenkumham, Kelurahan Ngade, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate.



5. Capaian Kinerja Lain-Lain

Bimbingan Klien Anak

Selama pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun 2023, jumlah pembuatan penelitian kemasyarakatan sebanyak 68 laporan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Penelitian Kemasyarakatan	Jumlah
1	Anak dibawah 12 tahun	2
2	Diversi	20
3	Sidang	15
4	Perawatan Tahanan Anak	4

5	Pembinaan Awal	14
6	Asimilasi	3
7	Cuti Bersyarat	1
8	Pembebasan Bersyarat	9
9	Cuti Menjelang Bebas	0
10	Perubahan Pidana	0
11	Pindah Lapas	0
	Jumlah Litmas	68

Kemudian jumlah penerimaan klien anak pada tahun 2023 ini sebanyak 19 orang dengan rincian 2 anak menjalani Asimilasi, 11 anak menjalani Pembebasan Bersyarat dan 6 orang menjalani Cuti Bersyarat.

Bimbingan Klien Dewasa

Pada tahun 2023, Bimbingan Klien Dewasa membuat laporan penelitian kemasyarakatan sebanyak 796 laporan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Penelitian Kemasyarakatan	Jumlah
1	Perawatan Tahanan	122
2	Pembinaan Awal	114
3	Asimilasi	159
4	Cuti Bersyarat	142
5	Pembebasan Bersyarat	244
6	Cuti Menjelang Bebas	0
7	Perubahan Pidana	2
8	Pindah Lapas	14
	Jumlah Litmas	796

Jumlah penerimaan klien dewasa pada tahun 2023 sebanyak:

sNo.	Jenis Penerimaan Klien	Jumlah
1	Cuti Menjelang Bebas	0
2	Pembebasan Bersyarat	174
3	Cuti Bersyarat	45
4	Asimilasi	74
Total Penerimaan Klien		293

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 ini yaitu:

1. Capaian kinerja yang terdapat dari Perjanjian Kinerja Tahun 2023 menunjukkan beberapa indikator mendapatkan hasil yang melampaui target.
2. Target Kinerja yang telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate yaitu “Pemberdayaan Pokmas bagi Klien Pemasarakatan” telah dilaksanakan dan masih dalam tahap koordinasi dengan instansi pemerintah, lembaga, dan perseorangan untuk dapat bekerja sama dalam pembentukan Griya Abhipraya.
3. Realisasi anggaran Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate pada tahun 2023 menacapai 98.78%.
4. Kinerja anggaran berdasarkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan nilai Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) pada Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate menunjukkan hasil yang sangat baik. Nilai IKPA 2023 sebesar 98.33, sementara nilai SMART tahun 2023 sebesar 99.81. Sehingga disimpulkan, hasil akhir dari capaian kinerja anggaran pada Bapas Ternate adalah **99,218**
5. Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate seperti pelaksanaan penelitian kemasyarakatan, pendampingan anak, pembimbingan dan pengawasan klien pemasarakatan dapat dilaksanakan dengan baik.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan pada laporan ini adalah

1. Capaian target kinerja dan perjanjian kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate termasuk kedalam kategori sangat baik, namun hal tersebut tidak menjadi berpuas diri dalam pelaksanaan tugas pada periode selanjutnya.
2. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate baik secara fasilitatif maupun secara teknis pemasarakatan menjadi hal wajib. Hal ini disebabkan untuk mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi menajdi lebih baik lagi.
3. Meningkatkan sinergisitas dan kolaborasi dengan satuan kerja baik pihak internal seperti Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Kanwil Kemenkumham Malut melalui Divisi Pemasarakata, satuan kerja jajaran Kanwil Kemenkumham Malut, dan satuan kerja dari pihak eksternal seperti Kepolisian

Daerah Maluku Utara dan jajaran dibawahnya, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan jajaran dibawahnya, Pengadilan Tinggi Maluku Utara beserta jajaran dibawahnya dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Masyarakat dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate berjalan dengan baik.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate dibuat dan sebagai bahan laporan.

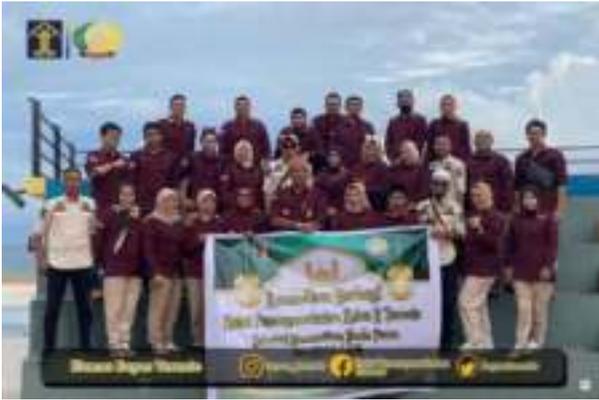
Ternate, 02 Januari 2024

Kepala Bapas Kelas II Ternate


Muhammad M. Marasabessy, S.H., M.Si.
NIP. 19781010 200312 1 003

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II TERNATE TAHUN 2023









LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II TERNATE
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad M. Marasabesy
Jabatan : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : M Adnan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ternate, 24 Januari 2023.

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Pihak Pertama,
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II
Ternate


M Adnan
NIP. 19950709 198603 1 002


Muhammad M. Marasabesy
NIP. 19781010 200312 1 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II TERNATE DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA**

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja Utama (3)	Target (4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna	50%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80

No. (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja Program (3)	Target (4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	85

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%
		2. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidkannya	35%
2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	6 Unit
		7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	10 Unit
		8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	16 unit
		9. Jumlah Gedung/Bangunan	430 m2

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 416,519,000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 416,519,000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 2,404,877,000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 2,404,877,000,-

Temate, 24 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

M. Adnan
NIP. 19650709 198603 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II
Temate

Muhammad M. Marasabesy
NIP. 19781010 200312 1 003





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II TERNATE
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad M. Marasabesy
Jabatan : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Ternate, 24 Januari 2023
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II
Ternate

Muhammad M. Marasabesy
NIP. 19781010 200312 1 003



LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II TERNATE
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad M. Marasabessy
Jabatan : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : M. Adnan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ternate, 18 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Maluku Utara

M. Adnan
NIP. 19650709 198803 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II
Ternate

Muhammad M. Marasabessy
NIP. 19781010 200312 1 003



BerAKHLAK



**SEMAKIN REFORMASI
PASTI HUKUM**

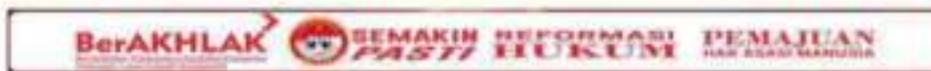
**PEMAJUAN
TANPA BALAI SANKSI**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II TERNATE DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna	45%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	77,5

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%
		2. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%
2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan

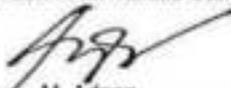


No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah layanan perkantoran	1 layanan
		6. Jumlah kendaraan bermotor	6 Unit
		7. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	10 Unit
		8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	16 Unit
		9. Jumlah gedung/ bangunan	260 M ²

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 828,994,000,-
Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	Rp. 828,994,000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 2,590,977,000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakat	Rp. 2,590,977,000,-

Ternate, 18 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Maluku Utara


M. Adnan
NIP. 19650709 198603 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Balai Masyarakat Kelas II
Ternate


Muhammad M. Marasabessy
NIP. 19781010 200312 1 003



REKORSAH
JANUARI KINERJA 2022





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II TERNATE
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad M. Marasabessy
Jabatan : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Ternate, 18 Januari 2022

Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II
Ternate


Muhammad M. Marasabessy
NIP. 19781010 200312 1 003



**BerAKHLAK SEMAKIN REFORMASI PEMAJUAN
PASTI HUKUM HAK ASAS MANUSIA**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II TERNATE
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad M. Marasabessy
Jabatan : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

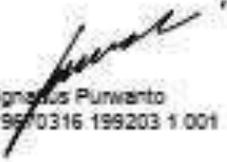
Nama : Ignatius Purwanto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Maluku Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ternate, 09 Januari 2024

<p>Pihak Kedua, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara</p>  <p>Ignatius Purwanto NIP. 19570316 199203 1 001</p>	<p>Pihak Pertama, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate</p>  <p>Muhammad M. Marasabessy NIP. 19781010 200312 1 003</p>
--	---





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II TERNATE DENGAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA**

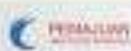
No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar.	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	70%
		2. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	40%
2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Sakder	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Dokumen
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	1 Dokumen
		3. Terpenuhiya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Dokumen
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Dokumen
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	5 Unit
		7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	20 Unit
		8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	90 Unit
		9. Jumlah Gedung/Bangunan	4000 M ²

BerAKHLAK



BERSAMA SAMA

REFORMASI HUKUM



berprestasi membangun bangsa



Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 624.218.000,-
Penyelenggaraan Pemasayarakatan di Wilayah	Rp. 524.219.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.558.654.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasayarakatan	Rp. 2.558.654.000,-

Ternate, 09 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Maluku Utara


Ignatius Purwanto
NIP. 19570316 199203 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Balai Pemasayarakatan Kelas II
Ternate


Muhammad M. Marasabessy
NIP. 19781010 200312 1 003

BerAKHLAK

SINERGI

REFORMASI
HUKUM

PEMALIHAN

bangga
melayani
bangsa





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II TERNATE
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad M. Marasabessy
Jabatan : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate

Berjanjikan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Ternate, 09 Januari 2024

Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II
Ternate

Muhammad M. Marasabessy
NIP. 19781010.200312.1.003

BerAKHLAK

SEMANGAT
PASTI

REFORMASI
HUKUM

PERMALIWA

bonggo
mentawani
bongio



**LAMPIRAN SK TIM PENYUSUN LKJIP
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II TERNATE**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II TERNATE**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II TERNATE

NOMOR : W.29.PAS.PAS.B-PR.03.01-62 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PADA KANTOR BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II TERNATE

KEPALA KANTOR BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II TERNATE,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membangun Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan menciptakan akuntabilitas kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) maka perlu dibentuk tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate;
 - b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dibawah ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate.
- Mengingat** :
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate;
 5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II TERNATE TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana dimaksud bertugas:
- Menyiapkan bahan-bahan yang mendukung penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari setiap divisi dan/atau Satuan Kerja;
 - Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan rencana strategis yang telah ditentukan dan capaian kinerja yang telah dicapai;
 - Melakukan riviú dan analisis terhadap capaian kinerja pada Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate sehingga dapat diketahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian target;
 - Menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan akuntabel, efektif, efisien, padat informasi, dan disertai dengan data dukung dan infografis;
 - Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
 - Menyampaikan laporan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ternate
Pada Tanggal 13 Januari 2023

KEPALA KANTOR BALAI PEMASYARAKATAN
KELAS II TERNATE



Ukurlah tanggung jawab secara akuntabel!

MUHAMMAD M. MARASABESSY
NIP. 19781010 200312 1 003



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara;
4. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Dibuat secara resmi dan bertanggung jawab secara akuntabel menggunakan nomor induk dokumen yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Dokumen (BPD), Badan Tindakan dan Sanksi Negara. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi laman: <https://www.kemham.go.id/infokemham>

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate
Nomor : W.29.PAS.PAS.8-PR.03.01-62 Tahun 2023
Tanggal : 13 Januari 2023

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
KANTOR BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II TERNATE

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Muhammad M. Marasabessy NIP. 19781010 200312 1 003	Penanggung Jawab
2.	Nurjana Makassar NIP. 19710421 199303 2 002	Ketua
3.	Trihartiny NIP. 19860322 201012 2 004	Sekretaris
4.	Himamadhi Aditya NIP. 19920303 201712 1 002	Anggota
5.	Ahmad Yolsangadji NIP. 19920830 201012 1 001	Anggota
6.	Deddy E. Teapon NIP. 19901015 201212 1 001	Anggota
7.	Dyah Ria Mutia NIP. 20011002 202012 2 002	Anggota



Ditetapkan di Ternate
Pada Tanggal 13 Januari 2023

KEPALA KANTOR BALAI PEMASYARAKATAN
KELAS II TERNATE



Ditandatangani secara elektronik oleh
Mumammad M. Marasabessy
NIP. 19781010 200312 1 003



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II TERNATE

NOMOR SOP	W29.PAS.PAS.8.PR.04.04.03-2631
TANGGAL PEMBUATAN	20 Desember 2023
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	22 Januari 2024
DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II TERNATE MUHAMMAD M. MARASABESSY NIP 19781010 200312 1 003</p>
NAMA SOP	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia10. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer2. Memahami penggunaan surat masuk dan keluar secara elektronik3. Memahami teknis penulisan surat dinas dan tata naskah persuratan4. Memahami prosedur monitoring dan evaluasi
KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Permintaan Data LKIP	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer/Printer/Scanner2. Jaringan Internet3. Aplikasi surat masuk/keluar elektronik4. Alat Komunikasi
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :
Penyusunan LKIP diperlukan untuk menyajikan Laporan Kinerja Kementerian secara menyeluruh. Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah akan terhambat.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)**

No	Kegiatan	PELAKSANA					Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
		Kabapas	Kaur TU	Kasubsi BKD	Kasubsi BKA	Pelaksana				
1	Memberikan disposisi kepada Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	MULAI					Surat Kantor Wilayah	15 Menit	Surat yang telah Disposisi oleh Kakanwil	
2	Memberikan disposisi kepada Kepala Urusan Tata Usaha untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)						Surat yang telah Disposisi oleh Kabapas	15 Menit	Surat yang telah Disposisi oleh Kabapas	
3	Memberikan disposisi kepada Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)						Surat yang telah Disposisi oleh Kaur TU	15 Menit	Surat yang telah Disposisi Kabapas	
4	Memberikan disposisi kepada Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)						Surat yang telah Disposisi oleh Kaur TU	30 menit	Arahan Penyusunan Laporan oleh Kaur TU	
5	Menghimpun dan Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)						Arahan Penyusunan Laporan oleh Kaur TU	2 Hari	Konsep Laporan	Konsep Laporan dilengkapi dengan Nota dinas berjenjang dan surat pengantar laporan
6	Mengoreksi konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan menyerahkan ke Kaur TU						Konsep Laporan	30 menit	Konsep Laporan yang sudah di Setujui oleh Kaur TU	Y: Ya, T: Tidak
7	Mengoreksi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan menyerahkan Kaur TU						Konsep Laporan yang sudah di Kasubsi BKD dan BKA	30 menit	Laporan yang sudah di Setujui oleh Kaur TU	
8	Mengoreksi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan menyerahkan kepada Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate						Laporan yang sudah di Setujui oleh Kaur TU	30 menit	Laporan yang sudah di Setujui oleh Kaur TU	
9	Menyetujui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan memerintahkan untuk dikirim ke Kantor Wilayah	SELESAI					Laporan yang sudah di Setujui oleh Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate	30 menit	LKIP yang telah di tanda tangani Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate	SOP Surat Keluar Pimpinan dan SOP Pengiriman Surat